
Opini

Opini

Tamat, 2 November 2012

Halaman 24

Individualisme Negatif

Oleh A.P. Edi Atmaja

KADANG, saya merasa, sikap mementingkan diri sendiri itu tak sepenuhnya buruk dalam nomenklatur kebangsaan kita. “Mementingkan diri sendiri” yang saya maksud bertolak dari permisalan Adam Smith, pemikir ekonomi itu, ketika ia berbicara soal jari kelingking.

Ketika ada seribu orang mati di Cina, kata Smith, Anda yang di Inggris mungkin bisa tidur nyenyak. Tapi, coba jika pada saat yang sama kelingking Anda tergores pisau, lalu bernanah. Gara-gara itu saja, barangkali, Anda jadi tidak tidur semalaman. Itulah individualisme, demikian Rizal Mallarangeng dalam *Dari Langit* (2008), yang sama sekali lain dengan egoisme.

Sikap mementingkan kelompok, komunalisme, pada masa-masa awal terbentuknya negara, memang menjadi anak emas para pendiri bangsa. Soekarno, misalnya, mengulang-ulang apa yang dinamakannya gotong royong, *holopis kuntul baris*. Sementara Mohammad Hatta mencetuskan suatu ekonomi kerakyatan.

Kedua istilah itu jelas memiliki makna yang setali-tiga-uang: marilah kita mengultuskan kepentingan bersama seraya mengutuk kepentingan pribadi. Marilah kesampingkan ego kita untuk menyokong ego mereka. Ayo semua ganyang individualisme buat menegakkan komunalisme. Dan seterusnya.

Dalam nomenklatur hukum, individualisme pun dipandang laiknya anak haram jadah. Hukum (formal) kita dipandang banyak kalangan sarat nuansa kolonial bawaan penjajah. Apa watak penjajah itu? Tentu saja: sifat dan sikap menghamba pada materi, berpikir bebas, dan mementingkan diri sendiri.

Individualisme dalam hukum tampak dari pemeo “hukum berhenti di depan kamar tidur”. Apa yang seseorang lakukan di dalam kamar adalah urusan individual nan privat yang tak boleh diganggu gugat. Begitulah watak hukum (pidana) kita, yang

ditentang oleh segenap pendekar hukum Tanah Air yang berpikir bahwa rakyat Indonesia belum sampai pada taraf itu, yakni ketika semua orang merasa mempunyai kedaulatan dan kemerdekaan penuh atas dirinya: prasyarat untuk mewujudkan persamaan di dalam hukum (*equality before the law*).

Namun, kini keadaannya lain. Apa yang ditentang pakar hukum itu memang terjadi di masa lalu, tatkala demokrasi belum tegak menjulang seperti sekarang, informasi belum terbuka seterbuka-bukanya di hadapan publik, dan otoriterisme penguasa masih memasung kemerdekaan berekspresi individu. Buntut dari semua “ketertutupan” itu adalah akses yang timpang antara pusat dan pinggir, mula-mula dari segi informasi, lalu menjalar ke segi-segi lain seperti pendidikan, kebudayaan, dan—terutama—ekonomi.

Apakah dengan datangnya globalisasi dan merajanya teknologi informasi di penghujung abad ke-20 dan permulaan abad ke-21 ketimpangan itu dapat teratasi? Saya akui belum. Tetapi, dengan melihat fenomena di akar-rumput, setidaknya-tidaknya sudah terbangun jembatan positif ke arah masyarakat yang semakin setara sekaligus berdaya.

Betapa, kita melihat, informasi tidak hanya dimonopoli kaum pusat. Masyarakat yang hidup di pelosok negeri bahkan jauh lebih kuat penguasaan informasinya. Kini, segalanya ada di desa. (Sedikit menyinggung semboyan salah satu provinsi: *Balik ndesa, mbangun desa*.) Masyarakat desa dimanjakan dengan segenap fasilitas yang di masa lalu hanya “patut” berada di kota. Warnet dan minimarket—dan tak cuma itu—merupakan dua penanda penting dari pergeseran tersebut.

Kemajuan (kalau boleh saya mengatakan demikian) masyarakat desa pasca-terbukanya informasi berimbas pada “kemajuan-kemajuan” lain. Saya tulis dalam tanda petik sebab dalam kacamata tertentu ia positif, sementara dalam kacamata lain berlaku sebaliknya. Dengan semakin terbukanya informasi, masyarakat desa kian tecerdaskan. *Jagongan* di warung kopi tak lagi berteman sawah yang mulai digarap atau kebun yang hendak dipanen, melainkan kasus suap dua hakim di Semarang, kekerasan di Sampang, dan seterusnya.

Di sisi lain, masyarakat desa, setelah mengunyah beragam informasi, memiliki lebih banyak alternatif untuk menjalani hidup dan berinteraksi satu sama lain. Mereka jadi lebih mirip masyarakat kota, yang cenderung rasional dan pragmatis dalam menyikapi keadaan.

Sifat dan sikap komunal, yang muncul lantaran kesalingtergantungan antarorang, kemudian luntur. Dengan informasi, setiap orang merasa memiliki kedigdayaan atas hidup dan pribadinya. Bertolak belakang dengan kondisi dahulu kala, di mana seseorang mesti melakoni pola-pola subordinatif agar dapat hidup di tengah masyarakat.

Kebebasan individu telah terbit di desa, menyusul ihwal serupa yang telah lama berlangsung di kota. Banyak petani tak mengindahkan kepentingan petani lain: begitu gampang tersulut konflik gara-gara irigasi atau jatah pupuk dari pemerintah. Pintu-pintu rumah sengaja ditutup untuk menghindari “intervensi” tetangga. Budaya lisan perlahan tapi pasti tergantikan oleh budaya tontonan. Pemuda-pemudi desa berbondong-bondong menjadi epigon: meniru segala yang mereka tonton.

Namun, sampai di sini saya belum bilang bahwa kebebasan individu itu buruk, individualisme itu haram. Adalah hipokrit kalau kita masih berkoar-koar, individualisme bukan bagian dari bangsa ini, saat ini. Hal itu sama hipokritnya dengan berpendapat bahwa hukum yang sekarang berlaku sarat nuansa individualisme, sehingga dengan demikian tidak patut diberlakukan di negara Pancasila ini.

Masyarakat kita telah berubah, itu harus kita akui dengan kerendahan hati. Kita mempunyai lebih banyak pilihan untuk terus melangkah sebagai sebuah bangsa. Pilihan-pilihan itu kadang menuntut kita untuk selalu mempertanyakan semua yang telah mapan. Pun hukum: ia adalah “sarana” yang tak lekang perubahan. Hukum itu selalu dinamis. Sedinamis apa? Tentu, mengikuti masyarakatnya. Masyarakat yang bagaimana? Ternyata, setelah kita jelajahi bersama, masyarakat yang tengah memeluk individualisme.

Sayang, individualisme yang dipeluk masyarakat kita belum menampakkan sisi positifnya. Sebagaimana gagasan-gagasan besar lain, semuanya cuma berpusing di permukaan. Individualisme kita maknai sebatas saling adu cepat di jalan raya, merenggut hak pengguna jalan lain. Individualisme kita praktikkan dengan bersikap cuek pada tetangga yang tertimpa musibah. Individualisme menuntut kita berlomba-lomba menjadi yang terdepan dan terbaik dengan menjatuhkan yang-lain, mengorbankan pihak lain.

Individualisme belum bisa membimbing kita untuk menghargai orang lain karena ke-lain-annya. Individualisme belum mampu mendorong kita untuk merengkuh nomor satu tanpa memiting jalan orang lain. Individualisme belum dapat

menciptakan kejujuran, keadilan, dan kedewasaan masyarakat, karena egoisme masing-masinglah yang selalu dikedepankan. Haruskah kita berpaling pada komunalisme, dari bayang-bayang individualisme negatif? **[28082012, 00.14]**

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 2 November 2012.